

Analisis Risiko akibat Keterlambatan Finalisasi Pengisian Data PDSS sebagai Dampak Kelalaian Administratif di SMK Negeri 5 Padang

Diego Prinanda^{1*}, Shalsabila Irmada², Sindi Dwi Savitri³, Tasya Mutia⁴

¹²³⁴Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 03 Januari 2026

Direvisi pada tanggal 04 Januari 2026

Diterima pada tanggal 06 Januari 2026

Terbit online pada tanggal 31 Januari 2026

Kata kunci:

Keterlambatan PDSS, Kelalaian Administratif, Analisis Risiko, Administrasi Sekolah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) merupakan jalur strategis penerimaan mahasiswa baru yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengisian padang data sekolah dan siswa (PDSS). Kegagalan sekolah dalam melakukan finalisasi PDSS tempat waktu berpotensi menimbulkan risiko administrative yang berdampak langsung pada hilangnya hak siswa untuk mengikuti seleksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko akibat keterlibatan finalisasi pengisian data PDSS sebagai dampak kelalaian administrative di SMK Negeri 5 Padang serta mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang relevan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik analisis data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal nasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait manajemen risiko dan administrasi Pendidikan. Analisis dilakukan melalui identifikasi, pengelompokan tematik, dan interpretasi naratif terhadap berbagai bentuk risiko administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan finalisasi PDSS di pengaruhi oleh empat jenis resiko utama, yaitu risiko operasional, risiko human eror, risiko system digital, dan risiko manajerial. Risiko tersebut muncul akibat ketidaklengkapan data akademik, keterbatasan kompetensi operator, ketergantungan pada system digital tanpa rencana kontinjensi, serta lemahnya pengambilan keputusan berbasis manajemen risiko. Dampak yang timbul bersifat signifikan karena menyebabkan hilangnya hak raturan siswa untuk mengikuti SNBP, menurunnyakepercayaan publik, serta terganggunya reputasi sekolah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko administrative yang sistematis di sekolah sebagai upaya perlindungan hak peserta didik dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi Pendidikan.

Penulis Korespondensi:

Diego Prinanda

Email: Diegoprinandaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur utama penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menitikberatkan pada rekam jejak prestasi akademik siswa selama masa studi di sekolah menengah. Mekanisme seleksi ini menempatkan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai instrumen krusial, karena seluruh proses penilaian SNBP bergantung pada

kelengkapan, ketepatan, dan ketepatan waktu data akademik yang diinput oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan keikutsertaan siswa dalam SNBP tidak hanya ditentukan oleh prestasi individu, tetapi juga oleh kualitas tata kelola administrasi sekolah dalam mengelola sistem data akademik secara profesional.

Namun, pelaksanaan SNBP 2025 kembali diwarnai oleh permasalahan keterlambatan finalisasi pengisian PDSS yang berdampak langsung pada hilangnya hak siswa untuk mengikuti seleksi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di SMK Negeri 5 Padang, di mana dari total 393 siswa kelas XII, hanya sekitar 90 siswa yang berhasil terinput ke dalam sistem PDSS hingga batas akhir pendaftaran. Akibatnya, ratusan siswa terancam gagal mengikuti SNBP bukan karena rendahnya capaian akademik, melainkan karena kendala administratif yang tidak terselesaikan tepat waktu. Fenomena ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan siswa dan orang tua, serta memunculkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas pengelolaan administrasi sekolah.

Pihak sekolah menyampaikan bahwa keterlambatan pengisian PDSS disebabkan oleh kendala teknis sistem serta hilangnya sebagian data nilai rapor siswa. Dalam mekanisme PDSS, permasalahan pada satu data siswa dapat menghambat keseluruhan proses finalisasi, sehingga sekolah memilih untuk menunda pengisian hingga data dianggap lengkap. Namun, keputusan tersebut justru berujung pada kegagalan finalisasi karena batas waktu pendaftaran terlampaui. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko administratif tidak hanya bersumber dari kesalahan teknis semata, tetapi juga dari lemahnya strategi pengambilan keputusan dan mitigasi risiko dalam situasi kritis yang memiliki batas waktu ketat.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, risiko dipahami sebagai potensi terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat ketidakpastian dalam proses operasional organisasi (Moreira et al., 2025). Pengelolaan risiko menuntut adanya proses sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, serta mitigasi risiko agar dampak yang merugikan dapat diminimalkan (Munawwaroh, 2017). Pada level sekolah, risiko administratif sering muncul dalam pengelolaan sistem informasi akademik, khususnya ketika terjadi ketidaksiapan sumber daya manusia, lemahnya prosedur pengendalian internal, serta ketergantungan tinggi pada sistem digital tanpa rencana kontinjensi yang memadai. Kasus SMK Negeri 5 Padang mencerminkan bagaimana kelalaian administratif dan ketiadaan mitigasi risiko yang efektif dapat berujung pada kegagalan layanan pendidikan yang berdampak luas bagi peserta didik.

Sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan formal memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak peserta didik atas akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterlambatan finalisasi PDSS yang menyebabkan siswa kehilangan kesempatan mengikuti SNBP menunjukkan bahwa tata kelola administrasi sekolah belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan hak peserta didik. Lebih jauh, pernyataan pihak penyelenggara SNPMB yang menyebutkan bahwa kelalaian pengisian PDSS oleh sekolah merupakan masalah yang berulang setiap tahun mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam manajemen risiko administrasi pendidikan yang belum tertangani secara komprehensif.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji SNBP dari aspek seleksi dan prestasi siswa, kajian yang secara khusus menempatkan keterlambatan finalisasi PDSS sebagai risiko administratif di tingkat sekolah masih relatif terbatas. Padahal, studi internasional menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko administratif yang efektif di lembaga pendidikan berperan penting dalam mencegah kegagalan layanan akademik dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Wandee, Sirisuthi & Leamvijarn, 2017). Dengan demikian, analisis risiko administratif dalam kasus SMK Negeri 5 Padang menjadi relevan tidak hanya sebagai evaluasi insidental, tetapi juga sebagai pembelajaran sistemik bagi peningkatan tata kelola sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis risiko akibat keterlambatan finalisasi pengisian data PDSS sebagai dampak kelalaian administratif di SMK Negeri 5 Padang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi jenis dan sumber risiko administratif yang menyebabkan keterlambatan finalisasi PDSS, serta (2) menganalisis strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan sekolah untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa pada pelaksanaan SNBP di masa mendatang. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen risiko administrasi pendidikan, sementara secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi sekolah dan pemangku kepentingan guna melindungi hak siswa terhadap akses pendidikan tinggi secara adil dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Manajemen Risiko dan Analisis Risiko

Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan sebuah organisasi. Sumber ancaman dapat berupa ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan manajemen, kecelakaan, bencana alam, maupun ancaman teknologi informasi.

Menurut Outreville (1998) dalam Sarjana dkk (2022) menyebutkan bahwa manajemen risiko melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan membiayai risiko perusahaan. As-Sajjad, dkk (2020) menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah metode sistematis dan logis untuk mengidentifikasi, menetapkan solusi, mengawasi, dan mengelola risiko organisasi.

Thenu dkk (2020) menyebutkan tujuan manajemen risiko adalah mencapai hasil yang optimal bagi organisasi. Surtikanti (2020) juga menjelaskan praktik manajemen risiko ditujukan untuk mencapai tujuan strategis melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif serta kepatuhan terhadap regulasi.

Jadi disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses terencana untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman agar tujuan organisasi tercapai. Proses ini memanfaatkan sumber daya secara efektif dan sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil optimal, mendukung pencapaian tujuan strategis, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut ISO 31000:2018 analisis risiko adalah bagian dari proses asesmen risiko yang meliputi: Identifikasi risiko, Analisis risiko (memahami karakteristik risiko), Evaluasi risiko (membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko)

Sedangkan analisis risiko Hopkin (2018) menjelaskan bahwa analisis risiko adalah proses untuk memahami nature (sifat) risiko dan menentukan level risiko dengan mengkombinasikan konsekuensi dan likelihood (kemungkinan).

Jadi disimpulkan bahwa Analisis risiko adalah proses sistematis untuk memahami, menilai, dan mengevaluasi potensi risiko dengan melihat sumber, kemungkinan, dan dampaknya. Proses ini mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko guna menentukan tingkat risiko, menetapkan prioritas, serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Komponen Utama Analisis Risiko

Menurut Sarjana dkk (2022) menyebutkan bahwa analisis risiko memiliki beberapa komponen penting yang harus dilakukan secara berurutan untuk memahami tingkat risiko dalam organisasi. Adapun komponen tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi penyebab risiko pada suatu kegiatan atau proses. Hal ini dilakukan agar organisasi memahami akar masalah sebelum melakukan penilaian lebih lanjut.
2. Menilai dampak risiko. Setelah penyebab diketahui, langkah berikutnya adalah menilai dampak (*consequence*) apabila risiko tersebut terjadi. Dampak dapat berupa: kerugian operasional, kerugian finansial, kerusakan reputasi, hambatan pencapaian tujuan organisasi.
3. Menilai tingkat keparahan risiko. Penting untuk menilai seberapa parah (*severity*) risiko tersebut jika benar terjadi. Penilaian tingkat keparahan membantu menentukan prioritas penanganan.
4. Menentukan level risiko (*risk level*). Komponen berikutnya adalah menentukan level risiko dengan menggabungkan: dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Level risiko ini digunakan untuk memilah risiko dari tinggi, sedang, hingga rendah.
5. Mengelompokkan risiko dari tertinggi ke terendah. Hasil analisis harus diakhiri dengan pengelompokkan risiko berdasarkan tingkat prioritasnya, dari yang berpotensi paling merugikan hingga yang paling ringan. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penanganan dan mitigasi.

Administrasi Pendidikan dan Risiko Administratif

Administrasi Pendidikan merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan Pendidikan secara efektif dan efisien.

Menurut Rahmadani (2024) menjelaskan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikutsertakan sumber-sumber potensi yang ada baik sarana dan prasarana maupun manusia dalam mencapai tujuan Pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Agustiansyah, n.d. menjelaskan bahwa prinsip administrasi Pendidikan yang baik mensyaratkan ketelitian, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, serta akurasi data merupakan landasan penting dalam pengelolaan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas.

Ushansyah (2017) menyebutkan aspek administrasi sekolah mencakup pengelolaan data akademik, penyusunan laporan, dan input data siswa ke sistem nasional (DAPODIK), yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional, pengambilan keputusan berbasis data, pelaporan ke pemerintah, serta mendukung kualitas pembelajaran.

Resiko administrative dalam Lembaga Pendidikan muncul ketika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur yang seharusnya dijalankan secara tertib dan terstandar. Risiko ini muncul akibat berbagai faktor, seperti beban kerja yang tinggi, rendahnya kompetensi operator data, ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP), lemahnya sistem pengawasan internal, serta adanya kesalahan manusia (*human error*). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Imam dkk (2023) yang menunjukkan bahwa risiko di sekolah kerap muncul akibat faktor internal, termasuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional, kurangnya fasilitas pendukung, serta kesalahan manusia dalam menjalankan tugas administratif. Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa beberapa risiko di sekolah berasal dari kelalaian manusia, misalnya kesalahan pengelolaan dokumen dan ketidaktepatan pelaksanaan prosedur, sehingga dapat berdampak langsung pada hambatan kerja lembaga.

Sistem PDSS dan SNBP

Gea et al., (2025) menjelaskan bahwa pangkalan data dan siswa (PDSS) merupakan suatu pendataan yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) di Indonesia. Sistem ini berperan sebagai basis data terintegrasi yang memuat berbagai informasi strategis mengenai peserta didik dan satuan Pendidikan, meliputi data akademik, nilai rapor, serta informasi pendukung lainnya yang diperlukan sebagai dasar dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) dalam Said et al., (2024) adalah jalur seleksi perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada prestasi akademik dan non-akademik siswa. Jalur ini diselenggarakan oleh panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) dan menggantikan jalur SNMPTN sebelumnya. Sekolah diwajibkan untuk menginput data siswa dan data nilai rapor ke dalam pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS). PDSS berfungsi sebagai basis data yang menentukan kelayakan siswa mengikuti SNBP.

Dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dijelaskan bahwa keberhasilan sekolah dan siswanya dalam SNBP sangat bergantung pada ketelitian sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) dengan data nilai rapor (SEMESTER 1-5/7) dan data prestasi yang valid, memastikan kesesuaian kurikulum, verifikasi data siswa, dan sinkronisasi tepat waktu.

Kelalaian administrasi seperti tidak menginput nilai, salah memasukkan data kurikulum, keterlambatan sinkronisasi PDSS atau ketidaksesuaian data akademik dapat menyebabkan sekolah dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat mengikutsertakan siswanya dalam SNBP meski berprestasi. Hal ini menjadi risiko serius karena menyangkut hak siswa memperoleh akses seleksi perguruan tinggi tanpa tes.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bentuk risiko administratif yang terjadi di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pengisian data dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berujung pada kegagalan keikutsertaan SNBP. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara rinci berdasarkan data yang sudah ada tanpa melakukan manipulasi variabel. Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber informasi berupa artikel jurnal nasional, laporan penelitian, serta dokumen regulasi terkait administrasi pendidikan dan sistem informasi sekolah. Seluruh artikel yang digunakan berasal dari jurnal yang dapat diakses secara terbuka dan diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2024 agar sesuai dengan perkembangan digitalisasi administrasi pendidikan.

Pada tahap identifikasi data, setiap artikel dibaca secara menyeluruh untuk mencatat bentuk risiko, penyebab, konteks sekolah, dan rekomendasi yang diberikan. Fokus utama dalam tahap ini adalah memilih temuan yang berkaitan langsung dengan risiko administratif, seperti kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, ketidakpatuhan terhadap SOP, kendala kemampuan operator, serta hambatan digital yang sering muncul pada tata kelola sekolah. Artikel yang tidak memuat pembahasan tentang risiko administrasi atau hanya berfokus pada mutu pembelajaran tanpa mengaitkannya dengan manajemen administrasi tidak dimasukkan ke dalam analisis, agar tema tetap konsisten dan hasil penelitian tidak menyimpang dari fokus utama.

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian informasi berdasarkan kategori tematik yang muncul dari hasil pembacaan data, sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Informasi dari berbagai artikel dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti risiko operasional, risiko human error, risiko sistem digital, dan risiko manajerial. Dengan mengorganisasi informasi ke dalam tema, penelitian ini dapat melihat pola risiko yang berulang serta memahami konteks yang melatarbelakanginya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskripsi tematik, yaitu teknik analisis yang menggambarkan temuan berdasarkan kategori yang telah diidentifikasi. Setiap kategori dianalisis secara naratif untuk melihat bagaimana risiko muncul, faktor apa yang mempengaruhi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap operasional sekolah. Kemudian analisis tambahan dilakukan dengan menelaah lebih dalam faktor penyebab risiko administratif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berhubungan dengan sumber daya manusia, beban kerja, dan kesiapan teknologi.

Seluruh proses analisis dilakukan secara manual dengan membaca, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data dari setiap artikel secara mendalam. Tidak ada prosedur statistik atau model kuantitatif yang digunakan, karena penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman deskriptif mengenai risiko administratif berdasarkan data empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hasil akhirnya berupa narasi integratif yang menjelaskan pola risiko administratif, akar penyebab, serta relevansinya dengan fenomena kegagalan sekolah dalam mengikuti SNBP akibat kelalaian pengisian PDSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif terhadap berbagai sumber pustaka dan dokumen kebijakan yang relevan, diperoleh gambaran bahwa keterlambatan finalisasi pengisian PDSS di SMK Negeri 5 Padang merupakan bentuk nyata risiko administratif yang berdampak langsung pada kegagalan layanan pendidikan, khususnya dalam konteks keikutsertaan siswa pada jalur SNBP. Risiko tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari keterkaitan berbagai faktor internal sekolah yang saling memengaruhi.

Hasil identifikasi risiko menunjukkan bahwa terdapat empat jenis risiko administratif utama. Pertama, risiko operasional, yang ditandai dengan tidak lengkapnya data nilai rapor, hilangnya sebagian arsip akademik, serta ketergantungan tinggi pada satu jalur finalisasi PDSS. Kondisi ini menghambat proses sinkronisasi data dan menyebabkan sekolah tidak mampu memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh SNPMB. Kedua, risiko human error, yang bersumber dari keterbatasan kompetensi operator data dan beban kerja administratif yang tinggi. Operator PDSS menghadapi tekanan waktu yang ketat, sementara dukungan pelatihan teknis dan pembagian tugas yang proporsional belum berjalan optimal. Akibatnya, kesalahan input, keterlambatan verifikasi, serta penundaan pengambilan keputusan menjadi sulit dihindari.

Ketiga, risiko sistem digital, yang berkaitan dengan kendala teknis pada platform PDSS, seperti gangguan sistem dan ketidakfleksibelan mekanisme finalisasi. Dalam sistem PDSS, kegagalan atau ketidaklengkapan data pada satu siswa dapat menahan proses finalisasi seluruh data sekolah. Ketergantungan penuh pada sistem digital tanpa prosedur alternatif memperbesar potensi kegagalan administratif. Keempat, risiko manajerial, yang tercermin dari lemahnya strategi pengambilan keputusan dan mitigasi risiko oleh pihak sekolah. Keputusan untuk menunda finalisasi dengan alasan menunggu kelengkapan data seluruh siswa justru memperbesar dampak risiko karena tidak mempertimbangkan keterbatasan waktu dan konsekuensi sistemik yang mungkin terjadi.

Dari sisi dampak, hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan finalisasi PDSS menimbulkan konsekuensi yang sangat signifikan, yaitu hilangnya hak ratusan siswa untuk mengikuti SNBP. Dampak ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis siswa, kepercayaan orang tua terhadap sekolah, serta reputasi institusi pendidikan di mata publik.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa risiko administratif dalam pengelolaan PDSS merupakan risiko berdampak tinggi (high risk) karena berkaitan langsung dengan hak dasar peserta didik atas akses pendidikan tinggi. Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi yang terjadi di SMK Negeri 5 Padang menunjukkan lemahnya proses identifikasi dan evaluasi risiko sebagaimana disarankan dalam kerangka ISO 31000:2018. Sekolah belum sepenuhnya memetakan potensi risiko sejak tahap awal pengisian data, sehingga tidak memiliki langkah mitigasi yang memadai ketika risiko mulai muncul.

Hasil ini sejalan dengan temuan Munawwaroh (2017) dan Anggraini dkk. (2023) yang menyatakan bahwa risiko administratif di sekolah umumnya bersumber dari faktor internal, khususnya ketidakpatuhan terhadap SOP, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan internal.

Dalam kasus ini, SOP pengelolaan PDSS belum dijadikan sebagai instrumen pengendalian risiko yang efektif, melainkan hanya sebagai prosedur administratif formal.

Dari sisi manajerial, keputusan sekolah untuk menunda finalisasi PDSS hingga seluruh data dianggap lengkap menunjukkan adanya kekeliruan dalam menentukan prioritas risiko. Dalam analisis risiko, risiko kehilangan hak siswa seharusnya ditempatkan sebagai risiko kritis yang membutuhkan penanganan segera, meskipun data belum sepenuhnya sempurna. Hal ini menguatkan pandangan Hopkin (2018) bahwa kegagalan organisasi sering kali bukan disebabkan oleh satu risiko besar, melainkan oleh akumulasi risiko kecil yang tidak dikelola dengan baik.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pendidikan, meskipun memberikan efisiensi, sekaligus menciptakan risiko baru apabila tidak disertai dengan kesiapan sumber daya manusia dan rencana kontinjensi. Ketergantungan penuh pada sistem PDSS tanpa skenario alternatif memperbesar kemungkinan kegagalan layanan, sebagaimana ditegaskan oleh Rahmawati dan Hidayat (2024) bahwa kompetensi digital dan pelatihan berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam meminimalkan risiko administratif berbasis teknologi.

Dalam konteks perlindungan hak peserta didik, keterlambatan finalisasi PDSS dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan tata kelola administrasi sekolah yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Sekolah tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pembelajaran, tetapi juga sebagai penjamin hak administratif siswa dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, manajemen risiko administratif seharusnya menjadi bagian integral dari manajemen sekolah, bukan sekadar respons insidental ketika masalah muncul.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa keterlambatan finalisasi PDSS di SMK Negeri 5 Padang merupakan manifestasi dari risiko administratif multidimensi yang melibatkan aspek operasional, manusia, sistem, dan manajerial. Tanpa perbaikan sistematis dalam manajemen risiko administrasi, potensi terulangnya kegagalan serupa pada pelaksanaan SNBP di masa mendatang akan tetap tinggi dan berimplikasi serius terhadap keadilan akses pendidikan bagi peserta didik.

5. KESIMPULAN

Keterlambatan finalisasi pengisian PDSS di SMK Negeri 5 padang menunjukkan bahwa risiko administratif dalam administrasi pendidikan merupakan persoalan strategis yang membutuhkan pengelolaan sistematis, bukan sekedar penanganan teknis insidental. Risiko tersebut muncul akibat dari lemahnya integrasi antara perencanaan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, serta pengambilan keputusan manajerial berbasis prioritas risiko. Ketidak mampuan sekolah dalam mengantisipasi batas waktu dan konsekuensi sistem PDSS memperbesar dampak risiko hingga berujung pada hilangnya hak siswa untuk mengikuti SNBP. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko administratif yang tersruktur, adaptif terhadap sistem digital, dan berorientasi pada perlindungan hak peserta didik merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas tata kelola sekolah dan keberlanjutan layanan pendidikan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar sekolah menerapkan sistem manajemen risiko administratif secara formal melalui penyusunan peta risiko PDSS, penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta pembagian tugas yang terukur dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kompetensi digital tenaga administrasi dan operator PDSS melalui pelatihan berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama. Sekolah juga disarankan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan internal, termasuk penerapan mekanisme monitoring berkala dan penetapan tenggat waktu internal yang lebih awal dari batas waktu sistem nasional. Dengan langkah tersebut, risiko administratif dapat diminimalkan dan perlindungan terhadap hak peserta didik dapat terjamin secara berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiansyah. (n.d.). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH. *Jurnal Pembelajaran Prospektif*, 8(1).
- Anggraini, H. Y., Aini, N., & Najicha, F. U. (2023). Manajemen risiko dalam mempertahankan mutu pendidikan di SMA Madina Citra Insani. *Jurnal AKAD*, 14(2), 210-222. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/akad/article/view/1350>
- As-Sajjad, R., Paul, S. K., & Azeem, A. (2020). Risk management for organizational resilience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50, 101-119.

- Gea, B. J., Aqilah, Z. N., & Siahaan, D. M. (2025). Keterlambatan Pengisian PDSS : Menghambat Impian dan Kesempatan Siswa ke Jenjang Pendidikan Tinggi , Mencari Solusi untuk Meningkatkan Efisiensi Guru dalam Era Pendidikan Abad 21. 2(April), 201-207.
- Hopkin, P. (2018). *Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective risk management*. Kogan Page Publishers.
- Imam Mars Miasya Ibnu Ivan¹, Sendi Nurtanti², F. S. (2023). Manajemen Risiko di SMK Muhammadiyah 1 Wates manajemen resiko yang baik untuk mengantisipasi tantangan , ancaman serta peluang yang. *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)*, 1(4), 118-125.
- ISO 31000:2018 - Risk Management Guidelines
- Kemendikdasmen. (2025). *Penyelesaian Pengisian Pdss Untuk Memberikan Kesempatan Siswa Mendaftar SNBP*.
- Moreira, F., Rodrigues, H., Peixoto, B., & Mendes, A. (2025). Risk management in education: A systematic literature review of the last five years. *International Journal of Educational Review*, 12(1), 15-34.
- Munawwaroh, Z. (2017). Analisis manajemen risiko pada pelaksanaan program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(2), 120-132. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/8295>
- Munawwaroh, Z. (2017). Analisis manajemen risiko pada pelaksanaan program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(2), 120-132.
- Rahmadani, A. (2024). *Konsep Administrasi Pendidikan*. 3(3).
- Rahmawati, I., & Hidayat, W. (2024). Implementasi manajemen risiko dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 45-56. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jmpid/article/view/3008>
- Said, J. O., Asbari, M., & Salsabila, H. I. (2024). Literaksi : Jurnal Manajemen Pendidikan Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri : Langkah Menuju Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi. 02(01), 107-111.
- Samiyah, & Jeprianto. (2024). Manajemen risiko dalam dunia pendidikan: Strategi dan praktik terbaik. *Studia Ulumina*, 8(1), 44-56.
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., Siregar, Z. H., Sohilauw, M. I., Wahyuni, S., ... & Badrianto, Y. (2022). *Manajemen Risiko*. Media Sains Indonesia.
- Sulistiawati. (2024). Risk management analysis of school management information system applications using ISO 31000:2018. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 13(1), 55-67.
- Surtikanti. (2020). Peran manajemen risiko dalam peningkatan kinerja organisasi. (pp. 17(2), 155-162.). *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Thenu, A., Rahayu, Y., & Handayani, D. (2020). Penerapan manajemen risiko dalam organisasi modern. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(3), 233-243.
- Ushansyah. (2017). Pentingnya Administrasi Sekolah Untuk. *Ittihad*, 15(27), 13-22.
- Wandee, M., Sirisuthi, C., & Leamvijarn, S. (2017). The study elements and indicators of risk management system for secondary schools in Thailand. *Universal Journal of Educational Research*, 5(3), 460-466.